

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINTAS
BATAS DI LAUT INDONESIA: PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH:

Alioth Wilem Belseran

2340058043



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINTAS
BATAS DI LAUT INDONESIA: PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

OLEH:

Alioth Wilem Belseran

2340058043



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alioth Wilem Belseran
NIM : 2340058043
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 5 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Alioth Wilem Belseran
2340058043



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia :
Perspektif Kepastian Hukum”

Oleh:

Nama : Alioth Wilem Belseran
NIM : 2340058043
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 5 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)
NIDN: 0020096802

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN : 0302117904

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0327046303

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN : 0302117904



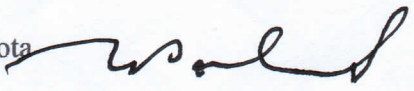
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 5 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Alioth Wilem Belseran
NIM : 2340058043
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum**” oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.	Ketua	
2 Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Anggota	
3 Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alioth Wilem Belseran
NIM : 2340058043
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas
Batas Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian
Hukum.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 5 Juli 2025

Alioth Wilem Belseran
2340058043

KATA PENGANTAR

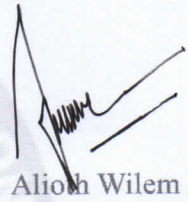
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan kasihNya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat dalam meraih gelar kesarjanaan Strata (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak di dalam penulisan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam prosesnya. Penulis menyampaikan penghargaan kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia dan selaku pembimbing pertama.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku pembimbing ke dua.
4. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.
6. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum.
8. Seluruh staff Tendik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan sehingga dengan rendah hati penulis menerima masukan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang di kemudian hari.

Jakarta, 5 Juli 2025



Aliom Wilem Belseran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Kerangka Konsep	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kejahatan Lintas Batas di Laut.....	13
1. Definisi dan Karakteristik Kejahatan Lintas Batas di Laut	13
2. Jenis-Jenis Kejahatan Lintas Batas di Laut	14
3. Data atau Tren Kasus Kejahatan Lintas Batas di Indonesia	15
B. Teori Penegakan Hukum	16
1. Elemen Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto	17
2. Relevansi Teori Penegakan Hukum dengan Penegakan Hukum di Laut	20

C.	Kepastian Hukum.....	22
1.	Definisi Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	23
2.	Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum dan Hubungannya dengan Keadilan.....	24
3.	Prinsip Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)	24
4.	Prinsip Non-Retroaktif.....	25
5.	Prinsip Aksesibilitas dan Transparansi Hukum	25
6.	Prinsip Keadilan Substantif.....	26
7.	Relevansi Kepastian Hukum dalam Konteks Kejahatan Lintas Batas	26
D.	Hukum Laut Internasional.....	28
1.	Konsep Hukum Laut Berdasarkan UNCLOS 1982.....	28
2.	Hak dan Kewajiban Negara Pantai dalam Zona Maritim	31
3.	Peran UNCLOS dalam Mengatur Penegakan Hukum di Laut	33
E.	Penegakan Hukum di Laut Indonesia	35
1.	Regulasi Nasional yang Relevan.....	35
2.	Peran Lembaga Penegak Hukum di Laut	37
3.	Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia	39
BAB III		42
Analisis Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Kejahatan Lintas Batas di Laut Indonesia		42
A.	Konsep Kepastian Hukum.....	44
1.	Definisi Kepastian Hukum Menurut Ahli Hukum.....	44
2.	Aspek-Aspek Kepastian Hukum	47
3.	Karakteristik Hukum yang Mencerminkan Kepastian Hukum	49
B.	Prinsip Kepastian Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum Laut Indonesia.....	50
1.	Kepastian Hukum dalam Kejahatan Lintas Batas di Laut	50
2.	Peran Undang-Undang Nasional dalam Menjamin Kepastian Hukum UU No. 66 Tahun 2024	52
3.	Pentingnya Kepastian Hukum untuk Keamanan Maritim	53
C.	Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia	

1. Tantangan dalam Implementasi Kepastian Hukum	55
2. Evaluasi terhadap Penerapan Prinsip Kepastian Hukum di Laut Indonesia	57
3. Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Penegakan Kepastian Hukum	58
4. Peran TNI AL dalam Menegakkan Kepastian Hukum di Laut	59
5. Peran Polairud dalam Penegakan Hukum di Laut	60
D. Kendala dan Hambatan dalam Penerapan Kepastian Hukum di Laut Indonesia.....	61
1. Masalah Korupsi di Lembaga Penegak Hukum	61
2. Penyelesaian Sengketa yang Lambat	62
3. Tantangan Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hukum Laut	63
E. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum di Laut Indonesia	65
1. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga.....	65
2. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum Laut	66
3. Reformasi Hukum dan Penegakan yang Lebih Tegas	67
Bab IV	70
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lintas Batas di Laut Indonesia	70
A. Pentingnya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lintas Batas di Laut Indonesia ..	70
B. Kejahatan Lintas Batas di Laut Indonesia	74
1. Jenis-jenis Kejahatan Lintas Batas yang Terjadi di Laut Indonesia.....	74
2. Dampak Kejahatan Lintas Batas terhadap Kedaulatan Negara	77
C. Lembaga Penegak Hukum yang Terlibat dalam Penegakan Hukum Laut	78
1. Badan Keamanan Laut (Bakamla)	79
2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).....	80
3. Polisi Perairan dan Udara (Polairud).....	81
D. Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Laut Indonesia	83
1. Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas	83
2. Kebijakan dan Regulasi Nasional yang Mendukung Penegakan Hukum Laut.....	85
3. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum Laut	87
E. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Laut Indonesia	89
1. Tantangan dalam Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum	89

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi	90
3. Korupsi dan Praktik Tidak Adil dalam Penegakan Hukum Laut	91
4. Masalah Penyelesaian Sengketa yang Lambat	92
F. Evaluasi terhadap Implementasi Penegakan Hukum Laut Indonesia	93
1. Keberhasilan dan Kekurangan dalam Penegakan Hukum Laut	94
2. Kendala dalam Menerapkan Kepastian Hukum	96
G. Rekomendasi untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Laut Indonesia	98
1. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum	99
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum	100
3. Reformasi Hukum untuk Penegakan yang Lebih Tegas	101
BAB V	103
KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
1. Fragmented Coordination	103
2. Regulasi yang Tidak Responsif	103
3. Keterbatasan Teknologi	103
4. Ancaman Keamanan dan Ekonomi	103
B. Saran	104
1. Reformasi Regulasi	104
2. Penguatan Koordinasi Lembaga	104
3. Peningkatan Kapasitas SDM	104
4. Kerja Sama Internasional	105
C. Implikasi Kebijakan	105
DAFTAR PUSTAKA	106

ABSTRAK

- A. Nama : Alioth Wilem Belseran
B. NIM : 2340058043
C. Bagian : Hukum Perdata
D. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas :
Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum
E. Halaman : 106 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : penegakan hukum, kejahatan lintas batas, kepastian hukum, laut Indonesia, UNCLOS.
G. Ringkasan isi :

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan wilayah lautnya dari berbagai bentuk kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif-analitik dengan mengkaji regulasi nasional seperti UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang cukup kuat dan lembaga-lembaga seperti Bakamla, TNI AL, dan Polairud memiliki peran yang signifikan, penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, antara lain: tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta budaya hukum yang belum mendukung kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum—yang mencakup legalitas, non-retroaktivitas, aksesibilitas, transparansi, dan keadilan substantif—belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum di laut Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan maritim seperti radar dan drone, serta reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan lintas batas. Kepastian hukum yang kokoh dibutuhkan untuk menjamin perlindungan terhadap kedaulatan negara, mendorong kerja sama internasional, dan menciptakan sistem penegakan hukum laut yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

- H. Daftar Acuan : 24 Buku + 3 Undang-Undang + 2 Konvensi + 73 Artikel Jurnal
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Alioth Wilem Belseran
B. NIM : 2340058043
C. Specific Program : Civil law
D. Title : *Law Enforcement Against Transboundary Crimes in : Indonesian Seas: A Legal Certainty Perspective*
E. Page : 106 Page + Bibliography
F. Keyword : *Law Enforcement, Transnational Crime, Legal : Certainty, Indonesian Waters, UNCLOS.*

G. Content summary

As the largest archipelagic state in the world, Indonesia faces serious challenges in securing its maritime territory from various forms of transnational crimes such as drug smuggling, human trafficking, piracy, and illegal fishing. This thesis aims to analyze the implementation of law enforcement against transnational crimes in Indonesian waters and to examine the application of legal certainty principles in that context. The study adopts a normative and descriptive-analytical approach by reviewing national regulations such as Law No. 66 of 2024 on Shipping, Law No. 34 of 2004 on the Armed Forces, and international instruments like UNCLOS 1982. The findings reveal that although Indonesia has a relatively strong legal framework and institutions such as Bakamla, the Navy, and the Water and Air Police play vital roles, law enforcement at sea remains hindered by overlapping jurisdictions, limited technological and human resources, and a legal culture that does not fully uphold the principle of legal certainty. Elements of legal certainty—such as legality, non-retroactivity, accessibility, transparency, and substantive justice—have not been consistently implemented in practice.

The thesis recommends enhancing inter-agency coordination, optimizing the use of maritime surveillance technologies such as radars and drones, and reforming maritime law to better address the challenges of transnational crime. A robust framework of legal certainty is essential to ensure sovereignty protection, foster international cooperation, and build an effective, fair, and sustainable maritime law enforcement system.

- H. Reference List : 24 Book + 3 Constitution + 2 Convention + 73 Journal Article
I. Academic Advisor I : Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H.
Academic Advisor II : Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.